

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Qodri Azizy. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Benjamin Mendelsohn. *Victimology and Contemporary Society's Trends*. New York: Oceana Publications, 1976.

Cut Asmaul Husna. *Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Aceh*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.

Eva Achjani Zulfa. *Restorative Justice: Paradigma Baru dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3 No. 1 (2014): 15–30.

Howard Zehr. *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. Pennsylvania: Herald Press, 2015.

Jum Anggriani. *Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*. Yogyakarta: Ius Quia Justum Press, 2011.

Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Lilik Mulyadi. *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktek, Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan*

Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Marlina. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Muhammad Taufik Makarao. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Nandang Sambas. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Sukardi. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.

T. M. Hasbi. *Syariat Islam di Aceh: Sejarah, Konsep, dan Implementasi*. Aceh: TintaMas, 2017.

Wagiati Soetedjo dan Melani. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2013.

Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Jonlar Purba. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.

B. Jurnal

Andi Djawiyah. "International Course ke-64 tentang Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan." *Artikel Akademik*, 2020.

Ari Yulistira dan Widayanti. "The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action." *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2021).

Budi Prakoso. "Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5 No. 2 (2019): 100–115.

Debora Sanur. "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh (Implementation of Special Autonomy Policies in Aceh)." *Jurnal Politika: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, Vol. 11 No. 1 (2020): 66.

Mariam Liebman. "Restorative Justice: A Theoretical Perspective." *Journal of Criminal Law*, Vol. 5 No. 2 (2016): 78–95.

Mulyana W. Kusumah. "Tindak Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional." *Artikel Hukum*, 2018.

Muliadin. "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2017): 45–58.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan

Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5735.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana

Anak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1149.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Lembaran

Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 7.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Lembaran Daerah

Aceh Tahun 2014 Nomor 6.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Berita Daerah

Aceh Tahun 2016 Nomor 10.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Hukuman Cambuk. Berita Daerah Aceh Tahun 2018

Nomor 5.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi

Pengadilan.

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) 1989. United

Nations General Assembly Resolution 44/25, 20 November 1989.

D. Website

Pidana Anak.” Diakses dari: <https://www.bphn.go.id> (diakses 20 Maret 2025).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Pedoman Pelaksanaan Diversi.” Diakses dari: <https://www.mahkamahagung.go.id> (diakses 20 Maret 2025).

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. “Data Anak Berhadapan dengan Hukum.” Diakses dari: <https://www.kemenkumham.go.id> (diakses 20 Maret 2025).

UNICEF Indonesia. “Diversion and Restorative Justice for Children in Conflict with the Law.” Diakses dari: <https://www.unicef.org/indonesia> (diakses 20 Maret 2025).

E. Putusan Pengadilan

Mahkamah Syariah Banda Aceh. (2020). Putusan Nomor 1/JN/2020/MS-Bna.

Mahkamah Syariah Bireuen. (2021). Putusan Nomor 02/JN/2021/MS-Bir.

F. Sumber Wawancara

Wawancara dengan Dr. Amir Khalis, Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, 20 Agustus 2025.

Wawancara dengan Aipda Jamil, Kasubbid 2 Unit PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh, pada tanggal 7 Agustus 2025.

